

TESIS

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 28
TAHUN 2019 TENTANG PENYETARAAN JABATAN
ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Program Studi Magister Administrasi Publik**

Oleh :

**ARIYATI MARSELLA
2120419320011**



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
BANJARMASIN
2023**

PENGESAHAN TESIS

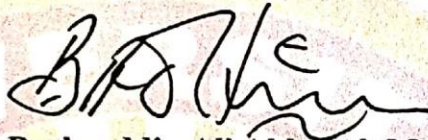
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan

Nama : Ariyati Marsella

NIM : 2120419320011

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Disetujui Komisi Penguji



Prof. Dr. H. Bachruddin Ali Akhmad, M.Si

Ketua



Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si

Anggota



Dr. H. Samahuddin M, S.IP, M.Si

Anggota

Mengetahui:

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Taufik Arbain, S.Sos, M.Si
NIP. 19740307200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si
NIP. 19730122 199802 1 001

Tahun Lulus 2023

Tanggal Wisuda:

ABSTRAK

Ariyati Marsella, 2021419320011, 2023. “Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan” di bawah bimbingan Bapak Bachruddin Ali Akhmad.

Penyelenggaraan suatu negara tentunya tidak terlepas dari peran pentingnya administrasi publik. Sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi dalam sistem administrasi publik di Indonesia antara lain struktur organisasi yang besar di tingkat pemerintahan pusat, persoalan *mental-model* SDM, maraknya kasus KKN, permasalahan manajemen kinerja dan buruknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Dari kelima permasalahan mendasar tersebut dapat disimpulkan pada intinya yang menjadi masalah utama dalam administrasi publik adalah dari SDM didalamnya yang menjalani segala proses birokrasi. Untuk itu dalam memecahkan masalah tersebut perlu diambil langkah konkrit untuk dapat merubah *mindset* dari SDM yang ada sehingga dapat melaksanakan segala proses birokrasi dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan belum berjalan dengan efektif. Dimana dari 4 (empat) variable berdasarkan teori implmentasi kebijakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan strukrur birokrasi masih dinilai belum sesuai dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari 2 (dua) aspek yaitu aspek implementator kebijakan dan aspek pejabat yang terdampak kebijakan. Sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan penyetaraan jabatan tersebut masih belum efektif.

Oleh karena itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat membangun sistem kerja yang lebih baik lagi dalam sistem jabatan fungsional ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan dalam peraturan perundang-undangan yang menaunginya. Maka dari itu diharapkan proses birokrasi juga dapat berjalan lebih baik lagi.

Kata kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi

ABSTRACT

Ariyati Marsella, 2021419320011, 2023. "Implementation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 28 of 2019 Regarding the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions in the Environment of the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province" under the guidance of Mr. Bachruddin Ali Akhmad.

The functioning of a country is undoubtedly inseparable from the important role of public administration. Some fundamental issues faced in the public administration system in Indonesia include a large organizational structure at the central government level, issues related to the mindset of human resources, the prevalence of corruption cases, performance management issues, and the poor quality of services provided to the public. From these five fundamental problems, it can be concluded that the main issue in public administration is the human resources undergoing all bureaucratic processes. Therefore, concrete steps are needed to change the mindset of existing human resources to carry out bureaucratic processes effectively.

The purpose of this research is to determine how the Implementation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 28 of 2019 Regarding the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions in the Environment of the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province is carried out. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. Data analysis employs qualitative data analysis techniques, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results indicate that the implementation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 28 of 2019 regarding the equalization of administrative positions into functional positions in the environment of the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province has not been effective. From the four variables based on the policy implementation theory by Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, it is still considered not suitable based on the research results from two aspects: the policy implementer aspect and the aspect of officials affected by the policy. Therefore, it can be said that the implementation of the position equalization policy is still not effective.

Therefore, the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province is expected to build a better working system in this functional position system so that it can run in accordance with the expectations of the relevant laws and regulations. Hence, it is hoped that the bureaucratic process can also operate more effectively.

Keywords: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan”**. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan berbagai pihak yang mendukung, membimbing, dan mengarahkan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Taufik Arbain, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Magister Adminitrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Prof. Dr. H. Bachruddin Ali Akhmad, M.Si selaku dosen Pembimbing.
5. Bapak Prof. Dr. H.Asmu'i, M.Si selaku dosen penguji I.
6. Bapak Dr. H. Samahuddin Muharram, S.IP, M.Si selaku dosen penguji II.
7. Seluruh Dosen dan Staf pada program Studi Magister Program Magister Adminitrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh informan dalam penelitian ini yang merupakan pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Suami, anak, orang tua, sahabat dan seluruh keluarga yang saya cintai dan sayangi yang telah memberikan doa dan semangat kepada saya selama menempuh pendidikan Magister dari awal hingga sekarang.
10. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Magister Administrasi Publik Tahun 2021 yang membantu dan mendukung dalam penyusunan Tesis ini.
11. Teman-teman di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan semangat kepada saya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam memberikan masukan, dorongan serta bantuan lainnya hingga terselesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Tinjauan Pustaka	
2.2.1. Kebijakan Publik	24
2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	24
2.2.1.2. Proses Kebijakan Publik	26
2.2.1.3. Model-Model Teoritik Implementasi Kebijakan Publik	29
2.2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	31
2.2.2. Kebijakan Penyetaraan Jabatan	43
2.2.2.1. Dasar Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan	43
2.2.2.2. Pengertian Penyetaraan Jabatan	45

2.2.2.3. Kriteria dan Persyaratan Penyetaraan Jabatan	46
2.2.2.4. Mekanisme Penyetaraan Jabatan	47
2.3. Kerangka Pemikiran.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Pendekatan Penelitian	51
3.2. Tipe Penelitian	52
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.5. Informan Penelitian.....	57
3.6. Lokasi Penelitian.....	57
3.7. Analisis Data	58
3.8. Validitas Data	62
3.9. <i>Transfer Ability</i>	64
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	65
4.1. Sejarah BKKBN.....	65
4.2. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.....	66
4.2.1. Visi Misi.....	66
4.2.2. Struktur dan Sumber Daya Manusia	72
4.3. Struktur Organisasi Sebelum Penyetaraan Jabatan	80
4.4. Struktur Organisasi Setelah Penyetaraan Jabatan	82
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
5.1. Hasil Penelitian	83
5.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang	

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	83
5.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.....	110
5.2. Pembahasan Hasil Penelitian	114
5.2.1. Impementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	114
5.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.....	120
5.2.2.1. Faktor Pendukung.....	120
5.2.2.2. Faktor Penghambat	121
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	123
6.1. Kesimpulan	123
6.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN.....	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jenjang Pangkat Eselon Jabatan Struktural	6
Tabel 1.2.	Rekap Pelantikan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	11
Tabel 2.1.	Matriks Penelitian Terdahulu	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Klasifikasi Jabatan ASN.....	4
Gambar 2.1. Proses Kebijakan Publik	27
Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III	32
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran.....	50
Gambar 3.1. Analisis Data Model Miles dan Huberman	58